

Ketika Polisi Diteror



Heri Priyatmoko
Dosen Sejarah, Universitas
Sanata Dharma
Sejarawan Solo

Sehari sebelum Lebaran, Selasa (5/7), Kota Solo kembali diguncang bom! Aksi bom bunuh diri di Mapolresta Surakarta itu sempat menimbulkan rasa cemas, apalagi bersamaan dengan para pemudik pulang kampung di karesidenan Surakarta. Aksi tersebut tidak boleh dianggap main-main. Pasalnya, Solo merupakan kampung halaman Presiden Joko Widodo. Mantan pengisaha mebel ini juga turut mudik laiknya para perantau yang rindu tanah kelahiran dan hendak sungkem kepada orangtua di hari Lebaran. Selain itu, Mapolresta merupakan simbol penegak keamanan wilayah. Dalam mengamankan perayaan tahunan mudik, polisi jelas semakin sibuk dan pusing.

Betapa *mangke!* kita disuguhki aksi gila itu di sesela menyambut hari raya Idul Fitri yang bahagia. Hati bertambah sakit akibat cap negatif "sarang teroris" yang dibubuhkan pada Kota Solo saban ada kejadian pengeboman. Stigma itu makin menguat dengan fakta para terduga teroris memang berasal dari kota tua ini. Citra buruk itu sangat merugikan masyarakat, tanpa kecuali Presiden Jokowi.

Kata "teroris" sebetulnya sudah menghantui masyarakat Solo sedari permulaan abad XX. Bersama komplotannya, Haji Mohammad Misbach sebagai salah satu pentolan Sarekat Islam kelahiran kampung batik Kauman tahun 1876 tersebut, mengguncang Surakarta dengan rentetan aksi pengeboman periode 1923. Dalam buku yang menjadi klasik, *Zaman*

Stigma itu makin menguat dengan fakta para terduga teroris memang berasal dari kota tua ini. Citra buruk itu sangat merugikan masyarakat, tanpa kecuali Presiden Jokowi.

Bergerak: *Radikalisme Rakyat di Jawa*, sejarawan Takashi Shiraishi memberi ulasan apik. Titik puncak perlawanan Misbach ialah saat Bom-bom dilempar ke dalam tembok Mangkunegaran, mobil-mobil para *sentana dalem*, rumah aristokrat di Kepatihan, mobil milik Paku Buwana X, dan rumah peristirahatan Wonerjaningrat yang mantan ketua Budi Oetomo. Kendati kebanyakan bom tak meledak dan kerusakannya sedikit, namun sanggup memanaskan suasana kota dan membuat polisi kelimpungan.

Akibat tindakan nekad itu, pemerintah *Walanda* sebagai simbol kolonialisme dan bangsawan kerajaan sebagai simbol feo-

Pada periode itu, nyaris serentak pihak kepolisian di Hindia Belanda "diuji" kesabaran dan kewaiannya meredam kejahatan. Misalnya, pada 1903 di seputar Batavia terjadi hampir 150 perampokan bersenjata. Teror lainnya, di daerah Besoeko yang kaya akan gula, terjadi lebih dari 600 pembakaran disengaja yang meluluhlantahkan sekitar 800 hektar ladang tebu. Fakta yang mencolok adalah pihak kepolisian tidak sekali pun dapat memperkirakan kemunculan peristiwa tersebut di atas.

Ahli sejarah Marieke Bloembergen (2011) membentangkan argumentasi ilmiah, petugas kepolisian gagal menangkap esensi: insiden perampokan

makan berita burung itu, penduduk wanita dan anak-anak mengungsi di Surabaya dan Madura. Sementara itu, para laki-laki, suami yang tetap tinggal, menyebar pecahan kaca di sekeliling pabrik gula, membuat lubang tembak dan tempat meriam di rumah administrator, dan berjaga-jaga di rumah kosong di sekeliling pabrik dengan membawa senjata api dan pasokan minyak panas.

Petinggi keamanan di negeri jajahan semakin pusing mendapati kahanan itu. Boekhoudt, ketua pengadilan negeri yang kerah bersentuhan dengan setumpuk tugas kepolisian, urun rembug, la menjelaskan, merembaknya kriminalitas di Jawa lantaran gagal-

yang lebih baik. Kemudian, mengganti opas polisi (*politieopasser*) dengan agen polisi (*politieagent*). Namun satu syarat utama adalah pendidikan-pelatihan. Hal ini penting dikerjakan sebab sebagian besar anggota kepolisian baik agen maupun mantri polisi, akan merekrut masyarakat pribumi. Pelatihan dan pendidikan akan bermanfaat bagi mereka yang belum memiliki harga diri, kepercayaan diri, dan kewibawaan.

Rekomendasi lainnya, yakni perluas formasi kepolisian. Penyebaran dan penempatan anggota polisi harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah Jawa dan Madura. Bahkan jumlah mantri polisi harus dilipatgandakan dari 299 orang menjadi 706 orang. Dianjurkan peningkatan kemampuan pengumpulan dan pengolahan informasi oleh kepolisian demi penguatan kendati pemerintah

atas masyarakat koloni. Jumlah opas polisi—sekarang disebut agen polisi—sebaliknya hanya ditingkatkan sebesar 10% dari 9.415 menjadi 10.226 orang. Proporsi yang terlalu kecil dibandingkan populasi penduduk saat itu yang mencapai lebih kurang 28 juta jiwa.

Sebelum menutup sepucuk tulisan ini, saya cukilkan kalimat bijak pemikir Cicero, sejarah ialah sang guru daripada kehidupan. Tenunan kisah masa lampau yang dihidangkan di atas menyadarkan kita bahwa dari waktu ke waktu, teroris bertambah giras jika aparat keamanan lembek dan kurang wasis! Bukan hanya polisi, sedapat mungkin aksi

Dok teror harus kita cegah bersama, minimal dengan bersikap waspada terhadap segala hal yang mencurigakan di sekitar kita. Menjadi tugas utama kita adalah membangun budaya perdamaian nasional-internasional dengan dialog kebudayaan, bukan kebenaran sesuai versinya masing-masing. Ketenganan dan kedamaian di Kota Solo merupakan impian bersama. ■



dalisme kian pusing dan geram. Sebab, beberapa waktu sebelumnya dalam upacara tradisional Sekaten yang diselenggarakan oleh Keraton Kasunanan, panitia diancam bakal terjadi keruwetan oleh gerombolan Misbach. Ancaman yang ditebar, yaitu Bangsal Sitinggil tempat duduk puluhan para tamu terhormat dari gubernemen dan kerajaan bakal dibakar. Tak ayal, perayaan tradisi kuno warisan kerajaan Demak yang seharusnya semarak dan gayung mendadak bersalin mencekam. Aparat kepolisian pun bersiaga penuh.

dan pemberontakan yang terjadi sebenarnya adalah bagian dari huru-hara terorganisir, serta terjadi peredaran senjata api secara bebas di masyarakat. Buahnya, komunitas Eropa yang dinahkodai gubernur jenderal mencermati seluruh peristiwa tersebut dalam konteks kehidupan masyarakat kolonial, didera rasa cemas dan gundah. Kecemasan membumbung, bersalin menjadi kepanikan kolektif.

Diperparah oleh beredarnya desas-desus tentang akan pecahnya kerusuhan bersenjata. Karena ter-

ya kepolisian dan sistem peradilan.

Boekhoudt memberi rekomendasi, yaitu profesionalisasi kepolisian. Syarat profesionalisasi kepolisian ialah hierarki atau perjenjangan jabatan yang ketat dengan penambahan jumlah strata kepangkatan: penguatan rasa percaya diri anggota kepolisian dengan menyediakan persenjataan

Redaksi menerima tulisan opini, diutamakan tema lokal Surakarta dan sekitarnya. Tulisan merupakan asli karya sendiri dan belum atau tidak dikirimkan ke media lain. Ketik sepanjang 8.000 karakter with spaces dan kirim via email ke: opini.joglosemar@gmail.com. Lengkapi identitas diri, foto dalam pose santai, nomor rekening dan nomor telepon. Jika dalam waktu dua pekan tulisan belum dimuat, otomatis penulis berhak mencabut tulisan tersebut.